



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

**Sistem Informasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
(UAKPPA)**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong (692535)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025 - *Audited*

Jl. Imam Bonjol No. 37, Melayu, Tenggarong
Kutai Kartanegara – KALIMANTAN TIMUR



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tenggarong, 31 Desember 2025
Kepala LAPAS Perempuan Tenggarong



RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	
- Laporan Keuangan dari e-rekon	
- Laporan Posisi Barang Milik Negara dan Persediaan di Neraca	
- Laporan Realisasi Anggaran	
- Neraca	
- Laporan Operasional	
- Laporan Perubahan Ekuitas	
- Laporan Realisasi Anggaran Belanja	
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah	
- Rekapitulasi Akun	
- Berita Acara Rekonsiliasi	
- Input Analisis	
- Lpj Bendahara Pengeluaran	
- Copy Petikan DIPA Tahun Anggaran 2025	
- Copy Rekening Koran per 31 Desember 2025	
- Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan	



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 37, Melayu, Tenggarong, KUKAR
Telepon.0811.559.8333

Email: lpp.smd@gmail.com, span418333@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tenggarong, 31 Desember 2025

Kepala LAPAS Perempuan Tenggarong



RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*).

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 (*Audited*) adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 32,724,497,- atau mencapai 174,07% persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp18.800.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp 8,242,911,730,- atau mencapai 95.81% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 8,602,988,000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025 (*Audited*). Nilai Aset pada per 31 Desember 2025 (*Audited*) dicatat dan disajikan sebesar Rp13.941.092.738,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp880.163.617,-; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.963.412.911,-; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp267.192.016,- dan Rp13.963.412.911,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp27.080.913,-

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp8.874.405.859,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp8.874.405.859,-) Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp8.874.405.859,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp8.847.324.946,-). ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.317.482,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 13.696.220.895,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2025 dengan tanggal 31 Desember 2025 (*Audited*) disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 (*Audited*) disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (AUDITED) DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18.800.000	32.724.497	174,07	44.998.369
JUMLAH PENDAPATAN		18.800.000	32.724.497	174,07	44.998.369
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.727.462.000	3.718.151.483	99,75	3.506.798.639
Belanja Barang	B.4	4.807.632.000	4.457.816.243	92,72	3.682.937.000
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		8.535.094.000	8.175.967.726	95,79	7.189.735.639
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	67.894.000	66.944.004	98,60	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		67.894.000	66.944.004	98,60	-
JUMLAH BELANJA		8.602.988.000	8.242.911.730	95,81	7.189.735.639

II. NERACA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (AUDITED) DAN
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	880.163.617	511.545.029
Jumlah Aset Lancar		880.163.617	511.545.029
PIUTANG JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.11	258.281.112	280.295.661
Pendapatan Diterima Di muka	C.12	8.910.904	
Uang Muka dari KPPN	C.13		-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.14		-
Jumlah Piutang Jangka Pendek		267.192.016	280.295.661
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.134.365.660	1.134.365.660
Peralatan dan Mesin	C.15	8.014.017.031	7.831.155.756
Gedung dan Bangunan	C.16	10.988.960.869	10.951.888.797
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	69.620.176	69.620.176
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(7.123.714.442)	(4.980.065.125)
Jumlah Aset Tetap		13.083.249.294	15.006.965.264
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.24	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		13.963.412.911	15.798.805.954
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25		-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	258.281.112	280.295.661
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	8.910.904	3.267.320
Hibah Yang Belum Disahkan	C.28		-
Utang yang belum ditagihkan	C.29		-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		267.192.016	283.562.981
JUMLAH KEWAJIBAN		267.192.016	283.562.981
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	13.696.220.895	15.234.947.312
JUMLAH EKUITAS		13.696.220.895	15.234.947.312
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13.963.412.911	15.518.510.293

III. LAPORAN OPERASIONAL

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (AUDITED) DAN
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	27.080.913	33.500.479
JUMLAH PENDAPATAN		27.080.913	33.500.479
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.718.151.483	3.506.798.639
Beban Persediaan	D.3	314.560.138	629.145.763
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.580.853.362	2.965.499.808
Beban Pemeliharaan	D.5	366.290.671	323.748.799
Beban Perjalanan Dinas	D.6	195.686.807	406.180.443
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	698.863.398	794.592.271
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		8.874.405.859	8.625.965.723
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.847.324.946)	(8.592.465.244)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Non lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(8.847.324.946)	(8.592.465.244)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(8.847.324.946)	(8.592.465.244)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN TENGGARONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 (AUDITED) DAN
2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	24.446.537.241
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(8.847.324.946)	(16.718.465.851)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(11.317.482)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.1	(6.127.392)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.6	(5.190.090)	(8.504.867)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
JUMLAH		(5.190.090)	(8.504.867)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	22.554.863.323	7.515.380.789
EKUITAS AKHIR	E.6	13.696.220.895	15.234.947.312

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Sistem Pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesadaran, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga bisa diterima lagi oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (pasal 1 UU No. 12 tahun 1995).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemasyarakatan memiliki Visi dan Misi yaitu :

VISI

“Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan di dukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan”.

MISI

Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dan sistematis dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.

Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stake holder.

Tujuan tersebut tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang di tuangkan dalam 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan, yaitu :

1. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Menjauhi pidana bukan hukuman balas dendam dari negara
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/ lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh mengisi waktu atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat
9. Narapidana hanya dijatuhi masa kehilangan kemerdekaan.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi Rehabilitasi korektif dan edukatif.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIA Tenggara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Hukum dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga

disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan	

	Piutang Negara/DJKN	
--	---------------------	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal untuk penyesuaian kegiatan dan Rencana Penarikan Dana Hal IV DIPA. Pada Bulan Januari 2025-Mei 2025 hingga sekarang adanya Pagu Blokir (*Automatic Audjsment*) untuk efisiensi senilai Rp2.720.043.000,-. Kemudian pada bulan Juni 2025 dilakukan Pembukaan Blokir senilai Rp1.282.143.000,-

Realisasi

Pendapatan

Rp32.724,497

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp32.724,497,- atau mencapai 174,7 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp18.800.000,-. Pendapatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Kemandirian warga binaan pemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31/12/2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan pajak	18.800.000	32.724.497	175%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	18.800.000	32.724.497	

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan 175% persen dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	T.A 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak	32.724.497	33.500.479	2,37
Jumlah	32.724.497	33.500.479	2,37

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara

Rp8.602.988.00

0

Realisasi Belanja instansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp8.602.988.000,- atau 95,81% dari anggaran belanja sebesar Rp8.602.988.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 (Audited)

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.727.462.000	3.718.151.483	99,75
Belanja Barang	4.807.632.000	4.457.816.243	92,72
Belanja Modal	67.894.000	66.944.004	98,60
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	8.602.988.000	8.242.911.730	95,81
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	8.602.988.000	8.242.911.730	95,81

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 (*Audited*) mengalami kenaikan berarti dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Lapas Perempuan Tenggarong melaksanakan penyerapan anggaran BAMA yang merupakan anggaran dengan persentase terbesar dari PAGU Belanja Barang, Belanja barang menjadi turun disebabkan adanya pemblokiran Pagu Anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.718.151.483	3.506.852.000	-6%
Belanja Barang	4.457.816.243	3.682.937.000	-17%
Belanja Modal	66.944.004	-	-100%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Jumlah	8.242.911.730	7.189.789.000	-13%

Belanja

Pegawai Rp

3.718.151.483,

-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 3.718.151.483,- dan Rp3.506.852.000,- Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 mengalami Penurunan -6% dari Realisasi Belanja Pegawai TA 2024. Hal ini antara lain disebabkan adanya pemecahan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga berpindah dengan Kode Satker baru.

Belanja

Barang Rp

4.457.816.243,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 (*Audited*) dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 4.457.816.243,- dan Rp3.682.937.000,- Realisasi Belanja Barang TA 2025 (*Audited*) mengalami penurunan sebesar -17% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini antara lain disebabkan adanya pemecahan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga berpindah dengan Kode Satker baru.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 (Audited) dan 2024

URAIAN	TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.087.235.691	2.233.400.856	-28%
Belanja Barang Persediaan	266.708.782	266.120.455	0%
Belanja Jasa	233.739.247	214.283.979	-8%
Belanja Barang Non Operasional	284.928.273	250.072.812	-12%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	195.686.807	406.180.443	108%
Belanja Pemeliharaan	389.517.443	312.748.989	-20%
Jumlah Belanja Kotor	4.457.816.243	3.682.807.534	-17%
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	4.457.816.243	3.682.807.534	-17%

Belanja Modal

Rp6.944.004,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 (*Audited*) dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp66.944.004,- dan Rp0,- Realisasi Belanja Modal TA 2025 (*Audited*). Belanja Modal masih dalam proses karna dalam e-katalog mengalami perubahan versi sehingga masih sulit mencari supplier.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2025 (*Audited*).

Belanja Modal

Peralatan dan

Mesin

Rp66.944.004,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal TA 2025 (*Audited*) dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp66.944.004,- dan Rp0,- Realisasi Belanja Modal TA 2025 (*Audited*).

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2025 (*Audited*).

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Gedung pada 31 Desember 2025 (*Audited*).

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2025 (*Audited*).

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada 31 Desember 2025 (*Audited*).

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,- per 31 Desember 2025 (*Audited*).

*Piutang
Lainnya
Rp0,-*

C.2 Piutang Lainnya

Saldo Kas Piutang Lainnya 0,- per 31 Desember 2025 (*Audited*).

*Barang
Konsumsi
Rp872.698.617,-*

C.3 Barang Konsumsi

Saldo Kas Barang Konsumsi Rp872.698.617,- per 31 Desember 2025 (*Audited*). Barang Konsumsi merupakan barang yang digunakan untuk keperluan perkantoran bersifat sekali habis.

*Bahan untuk pemeliharaan
Rp7.465.000,-*

C.4 Bahan untuk Pemeliharaan

Nilai bahan untuk pemeliharaan senilai Rp7.465.000,-. Merupakan bahan yang tersimpan untuk kegiatan pemeliharaan bahan Gedung bangunan.

*Tanah
Rp1.134.365.660,-*

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) masing-masing sebesar Rp1.134.365.660,- tidak ada perubahan angka.

*Peralatan dan Mesin
Rp.8.014.017.031,-*

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) masing-masing sebesar Rp.8.014.017.031,-

*Gedung dan Bangunan
Rp.10.988.960.869,-*

C.7 Gedung dan Bangunan

Terdapat Nilai Gedung dan Bangunan 30 September 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) masing-masing sebesar Rp.10.988.960.869,-.

*Aset Tetap Lainnya
Rp69.620.176,-*

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Rp69.620.176,- per 31 Desember 2025 (*Audited*).

*Diterima Dari
Entitas lain
Rp32.724.497,-*

C.9 Diterima Dari Entitas lain

Di terima dari entitas lain sebesar Rp32.724.497,-.

*Aset Tetap
yang tidak
digunakan
dalam operasi
pemerintah
Rp.0,-*

C.10 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah

Nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp0,-.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
yang tidak
digunakan
dalam operasi
pemerintah
Rp.0,-*

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah per 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp0,-. Merupakan Pengurangan nilai Aset.

*Beban
Pegawai yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.12 Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar senilai Rp0,- per 31 Desember 2025 (*Audited*). Merupakan kewajiban pemerintah kepada pegawai berupa Gaji Induk Bulan September 2025 yang baru akan turun SP2D pada tanggal 01 September 2025.

Belanja

*Barang Yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0,-*

C.13 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Utang yang belum diterima tagihannya senilai Rp.0,- per 31 Desember 2025 (*Audited*). Merupakan utang yang Bahan Makanan Tahun 2024 dan Hutang Langganan Daya Jasa bulan Desember 2025.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,-*

C.14 Uang Muka dari KPPN

terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 (*Audited*) Rp.0,- Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Transfer
Masuk
Rp. 0,-*

C.15 Transfer Masuk

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- Transfer Masuk Merupakan Transferan dari Kode Satker lama 418333 ke Kode Satker baru 692535.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-*

C.16 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi senilai Rp0,- per 31 Desember 2025 (*Audited*). Merupakan Koreksi atasi nilai Handy Talky (HT) Pengiriman dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

*Pendapatan
Sewa Tanah,*

C.17 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp10.423.000,- per 31 Desember 2025 (*Audited*).

Gedung dan Bangunan Rp10.423.000,- Merupakan Pemanfaatan Aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan oleh pihak ketiga yang dimana berupa sewa koperasi.

Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya **C.18 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya**

Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya senilai Rp22.301.497,- per 31 Desember 2025 (*Audited*). Merupakan Pendapatan berupa PNBP Hasil Penjualan Barang/ Jasa lainnya dari Kegiatan Kemandirian Warga Binaan.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Rp27.080.913,- Nilai Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) masing-masing sebesar Rp33.500.479,- dan Rp27.080.913,-. Nilai tersebut adalah pendapatan jasa lainnya dan Juga sewa gedung dan lahan untuk koperasi.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp3.718.151.483,- Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) masing-masing adalah sebesar Rp3.506.798.639,- dan Rp3.718.151.483,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

URAIAN JENIS BEBAN	THN 2025	THN 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.562.368.690	2.390.616.690	-7%
Beban Pemplatan Gaji PNS	39.758	41.494	4%
Beban Tunj Suami/Istri PNS	101.564.840	107.068.938	5%
Beban Tunj Anak PNS	33.460.280	35.648.542	7%
Beban Tunj Struktural PNS	88.200.000	90.900.000	3%
Beban Tunj Fungsional PNS	147.960.000	152.040.000	3%
Beban Tunj PPH PNS	8.998.935	7.650.535	-15%
Beban Tunj Beras PNS	131.731.980	132.673.440	1%
Beban Uang Makan PNS	599.164.000	556.786.000	-7%
Beban Tunj Umum PNS	20.255.000	8.775.000	-57%
Beban Uang Lembur PNS	24.408.000	24.598.000	1%
Jumlah	3.718.151.483	3.506.798.639	-6%

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp314.560.138,-*

Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp629.145.763,- dan Rp314.560.138,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	314.560.138	629.145.763	50%
Beban Persediaan Amunisi	0	0	
Jumlah	314.560.138	629.145.763	50%

*Beban Barang
dan Jasa
Rp3.580.853.362,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp3.580.853.362,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	102.867.568	100.701.421	-2%
Beban Pengadaan BAMA	2.874.186.636	2.283.181.007	-26%
Beban Penambah Daya TAHAN TUBUH	31.132.200	51.552.139	40%
Beban Pengiriman surat Dinas	221.000	629.500	65%
Beban Honor Operasional Satker	56.188.000	62.796.000	11%
Beban Operasional Lainnya	0	0	
Beban Brng Operasional COVID	0	0	
Belanja Bahan	165.562.100	141.743.600	-17%
Belanja Honor Output Keg	0	680.000	100%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	116.330.873	107.649.212	-8%
Belanja barang Non Operasional COVID	0	0	
Beban Langganan Listrik	96.788.100	89.529.500	-8%
Bebab Langganan Telepon	2.661.885	1.966.579	-35%
Beban Langganan Air	67.660.000	74.173.850	9%
Beban Jasa Profesi	46.900.000	31.800.000	-47%
Beban Jasa Lainnya	20.355.000	19.097.000	-7%
Jumlah	3.580.853.362	2.965.499.808	-21%

*Beban
Pemeliharaan
Rp349.190.671,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Nilai Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) masing-masing adalah sebesar Rp306.833.989,- dan Rp349.190.671,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	203.542.890	183.762.500	11%
Beban Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.647.781	123.071.489	18%
Jumlah	349.190.671	306.833.989	14%

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp195.686.807,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) masing-masing adalah sebesar Rp406.180.443,- dan Rp195.686.807,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	THN 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	147.986.807	331.330.443	-55%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.700.000	74.850.000	-36%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	
Jumlah	195.686.807	406.180.443	-52%

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*). Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*). Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan
Peralatan Dan
Mesin
Rp588.973.789,-*

D.9 Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin

Jumlah Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) masing-masing adalah sebesar Rp600.456.474,- dan Rp588.973.789,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban
Penyusutan
Gedung Dan
Bangunan
Rp.109.889.609,-*

D.10 Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan

Jumlah Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) masing-masing adalah sebesar Rp109.518.888,- dan Rp109.889.609,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Tidak terdapat Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*).

D.12 Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0,-*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus/Defisit pelepasan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,- (Beban Persediaan Rusak/Usang) adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

D.13 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat saldo nilai pos luar biasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*).

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal UAKPA 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Defisit LO

Rp-

Rp.8.847.324.946

,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp16.718.465.851,- dan Rp.8.847.324.946,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp.6.172.392,-

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp0,- dan Rp.6.127.392,- Koreksi Atas Reklasifikasi adalah proses perbaikan pencatatan aset (persediaan/aset tetap/lainnya) akibat kesalahan klasifikasi kodefikasi sebelumnya.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*). Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*).

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp.0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*).

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp5.190.090,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Nilai Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah masing-masing Rp8.504.867,- dan Rp5.190.090,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-
Lain Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Nilai Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp22.554.863.32
3,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp7.515.380.789,- dan Rp22.554.863.323,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang

berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode per 31 Desember 2025 (*Audited*), tidak terdapat DDEL DKEL.

*Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
Rp.0,-*

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Nilai Transfer Masuk pada tanggal 31 Desember 2025 (*Audited*) senilai Rp0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (*Audited*). Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Tidak terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (*Audited*).

Ekuitas Akhir
Rp13.696.220.895,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp15.234.947.312,- dan Rp13.696.220.895,-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada pengungkapan lain-lain setelah tanggal neraca yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Informasi Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya

A. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025 (*Audited*)

a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Satuan Kerja: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Kode Satker 692535

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 31- Des	Sisa Pagu s.d. 31-Des- 2025	Rencana Realisasi	Estimasi Total Realisasi	Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
A	B	C	D	E	F (C + E)	G (B – F)
51	Rp.3.727.462.00,-	Rp.3.718.151.483,-	Rp.9.310.517,-	-	Rp.3.718.151.483,-	Rp.9.310.517,-
52	Rp.4.807.632.000,-	Rp.4.457.816.243,-	Rp.349.815.757,-	-	Rp.4.457.816.243,-	Rp.349.815.757,-
53	Rp.67.894.000,-	Rp.66.944.004,-	Rp.949.996,-	-	Rp.66.944.004,-	Rp.949.996,-
Total	Rp.8.602.988.000,-	Rp.8.242.911.730,-	Rp.360.076.270,-	-	Rp.8.242.911.730,-	Rp.360.076.270,-

Sampai dengan Semester II tahun 2025 (*Audited*), realisasi belanja barang/modal/bansos sebesar Rp.8.242.911.730,- (95.81 %). Serapan tersebut Sudah mencapai target penyerapan (< 95%) namun masih terdapat pagu anggaran yang terblokir sebesar Rp.350.243.659,- pada tahun 2025 dan tidak dapat dilakukan realisasi.

b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi

Satuan Kerja: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d. 31- Des- 2025	Rencana Realisasi TA 2025	Total Realisasi	Estimasi Sisa Pagu/Pagu Minus
A	B	C	D	E	F (D + E)	G (C – F)
51	Belanja Pegawai	Rp.3.727.462.00,-	Rp.3.718.151.483,-	-	Rp.3.718.151.483,-	Tidak ada

Sampai dengan Semester II tahun 2025 (*Audited*), terdapat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.9.310.517,-,- dan tidak terdapat pagu minus (berdasarkan To-Do List MonSAKTI). Atas pagu minus tersebut, satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong telah melakukan/mengusulkan revisi anggaran antar jenis belanja/satker untuk menyelesaikan pagu minus belanja pegawai.

c. Informasi Pagu Blokir

Satuan Kerja: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong

No.	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
1	51	Rp.3.189.033.000,-		-	-
2	52	Rp.4.722.297.000,-	Rp.350.243.659,-	-	-
3	53	Rp.67.894.000,-		-	-
TOTAL		Rp.7.979.224.000,-	Rp.350.243.659,-		

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp.350.243.659,-Sampai dengan Semester II Tahun 2025 (*Audited*).

2. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

a. Informasi Outstanding Kontrak

Satuan Kerja: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong

Jumlah Kontrak	Nilai Total Kontrak	Realisasi	Sisa Nilai Kontrak
1	Rp.2.633.224.000,-	Rp.2.631.448.364,-	Rp.1.775.636,-
2	Rp.196.728.208,-	Rp.196.728.208,-	Rp.0
3	Rp.32.194.000,-	Rp.32.194.000,-	Rp.0

Sampai dengan Semester tahun 2025 (*Audited*), tidak terdapat terdapat kontrak yang masih *outstanding*.

Berdasarkan *outstanding* kontrak tersebut, sebanyak 3 (tiga) kontrak yang telah selesai terlaksana dengan rincian sebagai berikut:

Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

Satuan Kerja: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong

No.	No. Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
1	W.18.PAS.PA S.7-PB.02.01-3121	Pengadaan Bahan Makanan WBP	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Rp.2.633.224.000,-	Rp.2.631.448.364,-	Rp.1.775.636,-
2	W.18.PAS.7-PB.02.01-572	Belanja barang Operasional Pemeliharaan Gedung dan	25 Juli 2025	25 Agustus 2025	Rp.196.728.208,-	Rp.196.728.208,-	Rp.0,-

		Bangunan dan Halaman					
3	EP-01K6206WJ2C TWZ1FTTVV SHY6K5	Belanja Modal meja kerja dan arsip	26 September 2025	07 Oktober 2025	Rp.32.194.000,-	Rp Rp.32.194.000,- .0,-	Rp.0,-

Sumber: Aplikasi OMSPAN tanggal

Berdasarkan *outstanding* kontrak signifikan tersebut, Semua kontrak dapat di selesaikan dengan tepat waktu

3. Informasi Progres Likuidasi K/L pada Kabinet Merah Putih

a. Progres Likuidasi Berdasarkan Mutasi Nilai Aset dan Kewajiban

Satuan Kerja: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong

Pos Neraca	Nilai Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	Nilai Saldo 31 Desember 2025 (Audited)	Mutasi	% Progres Likuidasi
A	B	C	D (B - C)	E (D / B x 100%)
Aset				
-Barang Konsumsi		Rp.872.698.617,-	Rp.872.698.617,-	100%
-Tanah		Rp.1.134.365.660,-	Rp.1.134.365.660,-	100%
-Peralatan dan Mesin		Rp.8.014.017.031,-	Rp.8.014.017.031,-	100%
-Gedung dan Bangunan		Rp.10.988.960.869,-	Rp.10.988.960.869,-	100%
-Aset Tetap Lainnya		Rp.69.620.176,-	Rp.69.620.176,-	100%
-Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(Rp.5.475.370.308,-)	(Rp.5.475.370.308,-)	100%
-Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(Rp.1.648.344.134,-)	(Rp.1.648.344.134,-)	100%
Kewajiban				
-Kewajiban Jangka Pendek				
-Kewajiban Jangka Panjang				

Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Telah sselesai melakukan proses likuidasi dari kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

B. Informasi Penting Lainnya

1. Kondisi

Penjelasan informasi mengenai kondisi dapat meliputi reorganisasi, pergantian pimpinan, kepemilikan aset seperti melimpahkan atau menerima aset hasil likuidasi, dan lain sebagainya.

2. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama

Penjelasan informasi mengenai Hal Khusus Menyangkut Program Strategis memuat penjelasan program strategis yang meliputi penjelasan atas target dan capaian secara ringkas. Misalnya Badan Gizi Nasional menjelaskan program Makanan Bergizi Gratis, Kementerian Koperasi menjelaskan program Koperasi Merah Putih, atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjelaskan program Sekolah Garuda.

3. Kondisi Keuangan yang Memerlukan Perhatian Khusus K/L

Memuat keterangan dan penjelasan akun-akun yang signifikan baik LRA, LO, LPE, dan Neraca. Pemilihan akun signifikan tersebut mempertimbangkan rasio persentase akun terkait dengan total pendapatan/belanja/aset/kewajiban/beban pada setiap komponen laporan keuangan, akun yang khusus pada K/L tersebut, dan pertimbangan kebutuhan manajerial lainnya untuk diuraikan lebih lanjut. Misalnya Kementerian Keuangan menjelaskan akun pendapatan perpajakan, Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan akun belanja modal (infrastruktur) dan akun aset, atau Kementerian Sosial menjelaskan akun belanja sosial.

Penyusunan informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya sebagaimana poin A dan B pada Entitas Akuntansi di bawah K/L dapat disesuaikan dengan kebutuhan Entitas Pelaporan.

Penyajian Data Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Lampiran Laporan Keuangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan

(11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan.

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025 (*Audited*) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong antara lain sebagai berikut:

INFORMASI KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025

Satuan Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong
Fungsi : 03.03 Pembinaan Hukum
Sub Fungsi : 03.05 Lembaga Pemasyarakatan

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BF.6170	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah								
BF.6170.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								
BDC.002	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	141.765.000	108.142.440	76,283	285	285	Orang	100	
BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	3.197.451.000	3.191.139.740	99,803	285	285	Orang	100	
BDC.004	Pembinaan Kemandirian Narapidana	153.200.000	122.560.000	80,000	20	20	Orang	100	
BHB.007	Pelaksana Kegiatan rehabilitasi Sosial	59.970.000	40.256.000	67,127	250	250	Orang		
BHB.002	Operasi Keamanan dan Ketertiban	35.740.000	23.866.150	66,777	12	12	Operasi	100	
	Subtotal	3.588.126.000	3.485.964.330	97,153					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*								
WA.6172	Pemasyarakatan								
WA.6172.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
EBA.956	Layanan BMN	4.536.000	3.462.000	76,32275132	1	1	Layanan	100	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.010.000	1.010.000	100	1	1	Layanan	100	
EBA.962	Layanan Umum	43.943.000	20.245.850	46,073	1	1	Layanan	100	
EBA.994	Layanan Perkantoran	4.832.866.000	4.640.627.046	96,022	1	1	Layanan	100	
EBB.951	Layanan Sarana internal	67.894.000	66.944.000	98,601	19	19	Unit	100	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	29.613.000	14.442.000	48,769	60	60	Orang	100	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9.608.000	-	0,000	1	1	Dokumen	100	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.182.000	2.182.000	100,000	1	1	Dokumen	100	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3.010.000	3.010.000	100,000	1	1	Dokumen	100	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	20.200.000	5.024.000	24,871	1	1	Dokumen	100	
	Subtotal	5.014.862.000	4.756.946.896	94,857					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*								
	Total	8.602.988.000	8.242.911.226	95,815					



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



RIVA DILYANTI

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (692535) LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:45 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	27,080,913	0	27,080,913	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	27,080,913	0	27,080,913	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	27,080,913	0	27,080,913	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,718,151,483	0	3,718,151,483	
Beban Persediaan	314,560,138	0	314,560,138	
Beban Barang dan Jasa	3,580,853,362	0	3,580,853,362	
Beban Pemeliharaan	366,290,671	0	366,290,671	
Beban Perjalanan Dinas	195,686,807	0	195,686,807	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (692535) LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:45 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	698,863,398	0	698,863,398	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	8,874,405,859	0	8,874,405,859	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,847,324,946)	0	(8,847,324,946)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,847,324,946)	0	(8,847,324,946)	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8,847,324,946)	0	(8,847,324,946)	0

Keterangan :

FINAL



Tenggarong, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (692535) LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Tgl Data : 07/05/26 12:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 7:48 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8,847,324,946)	0	(8,847,324,946)	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(11,317,482)	0	(11,317,482)	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(6,127,392)	0	(6,127,392)	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(5,190,090)	0	(5,190,090)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	22,554,863,323	0	22,554,863,323	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	13,696,220,895	0	13,696,220,895	0
EKUITAS AKHIR	13,696,220,895	0	13,696,220,895	0

Keterangan :

FINAL



Tenggarong, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



KEMENIMIPRAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 137
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 04
SATUAN KERJA : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG 692535

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 7:49 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	18,800,000	32,724,497	13,924,497	174	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,800,000	32,724,497	13,924,497	174	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	18,800,000	32,724,497	13,924,497	174	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	8,602,988,000	8,242,911,730	(360,076,270)	96	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	3,727,462,000	3,718,151,483	(9,310,517)	100	0	0	0	0
2. Belanja Barang	4,807,632,000	4,457,816,243	(349,815,757)	93	0	0	0	0
3. Belanja Modal	67,894,000	66,944,004	(949,996)	99	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 137
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 04
SATUAN KERJA : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG 692535

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 7:49 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	8,602,988,000	8,242,911,730	(360,076,270)	96	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



Tenggarong, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (692535) LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:52 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	880,163,617	0	880,163,617	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	880,163,617	0	880,163,617	
ASET TETAP				
Tanah	1,134,365,660	0	1,134,365,660	0.00
Peralatan dan Mesin	8,014,017,031	0	8,014,017,031	0.00
Gedung dan Bangunan	10,988,960,869	0	10,988,960,869	0.00
Aset Tetap Lainnya	69,620,176	0	69,620,176	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,123,714,442)	0	(7,123,714,442)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	13,083,249,294	0	13,083,249,294	
JUMLAH ASET	13,963,412,911	0	13,963,412,911	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	258,281,112	0	258,281,112	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	8,910,904	0	8,910,904	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	267,192,016	0	267,192,016	
JUMLAH KEWAJIBAN	267,192,016	0	267,192,016	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	13,696,220,895	0	13,696,220,895	0.00
JUMLAH EKUITAS	13,696,220,895	0	13,696,220,895	
JUMLAH EKUITAS	13,696,220,895	0	13,696,220,895	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	13,963,412,911	0	13,963,412,911	

Keterangan :

FINAL



Tenggarong, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh

RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (692535) LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:52 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	872,698,617	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	7,465,000	0
0.0	131111	Tanah	1,134,365,660	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	8,014,017,031	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,988,960,869	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	69,620,176	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,475,370,308
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,648,344,134
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	258,281,112
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	8,910,904
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	8,242,911,730
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	32,724,497	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	14,326,778,090
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5,190,090	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	17,898,000
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	6,127,392	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,779,416
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	22,301,497
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,562,368,690	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	39,758	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	101,564,840	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	33,460,280	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	88,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	147,960,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	8,998,935	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	131,731,980	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	599,164,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	20,255,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	24,408,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	102,867,568	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	2,874,186,636	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	31,132,200	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	221,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56,188,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	165,562,100	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	116,330,873	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	96,788,100	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,661,885	0

yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (692535) LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:52 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Beban Langganan Air	67,660,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	46,900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	20,355,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	203,542,890	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145,647,781	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	147,986,807	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	47,700,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	588,973,789	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	109,889,609	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	314,560,138	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	17,100,000	0
JUMLAH			30,005,575,191	30,005,575,191

Keterangan :

FINAL



Tenggarong, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

RIVA DILYANTI
NIP 198305202001122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (692535) LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 7:54 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	8,242,911,730
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	32,724,497	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,423,000
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	22,301,497
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,562,368,690	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39,758	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	101,564,840	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33,460,280	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	88,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	147,960,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	8,998,935	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	131,731,980	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	599,164,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,255,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	24,408,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	102,780,916	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	2,896,913,575	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	31,132,200	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	221,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,188,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	165,562,100	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	119,366,173	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	266,708,782	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	96,053,600	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,623,047	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	67,807,600	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	46,900,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	20,355,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240,614,962	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,110,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142,612,481	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,180,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	147,986,807	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47,700,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66,944,004	0
JUMLAH			8,275,636,227	8,275,636,227

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan :

FINAL



Tenggarong, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

RIVA DILYANTI
198305202001122001